KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Industri rokok tertekan, awas pengangguran berjemaah melonjak
Tanggal : Rabu, 10 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Industri Rokok Tertekan

Awas Pengangguran Berjemaah Melonjak

ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyoroti potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri rokok. Selain harga rokok yang terus melambung, maraknya peredaran rokok ilegal turut memperparah industri ini.

Irma mengatakan, produk-produk yang dikelola secara rumahan itu tidak memberikan cukai kepada Pemerintah. Sedangkan rokok bercukai berharga mahal.

Komisi IX, kata Irma, berkomitmen terus melakukan pengawasan guna meminimalisir potensi PHK dan memulihkan ekosistem industri rokok di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan investigasi, sehingga tahu akar permasalahannya.

"Kita bisa merekomendasikan kepada Pemerintah solusinya seperti apa agar pengangguran berjemaah tidak semakin bertambah," tegas politikus Partai NasDem itu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menambahkan, beban cukai yang terus naik serta regulasi kesehatan yang semakin ketat sebagai penyebab utama tekanan industri rokok.

Di satu sisi, tarif cukai rokok tiap tahun terus dinaikkan. Di sisi lain, aturan kesehatan terhadap rokok juga makin diperketat.

"Ini kebijakan yang terkesan mendua," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Diketahui, meski tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun ini tidak naik, Pemerintah tetap menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) hampir semua produk tembakau melalui PMK Nomor 96 dan 97 Tahun 2024.

Karena itu, Yahya meminta Pemerintah tidak terus menekan industri rokok, mengingat kontribusi terhadap penerimaan negara sangat besar.

"Industri rokok menyumbang sekitar Rp 230 triliun dalam bentuk cukai dan mempekerjakan sekitar dua juta orang, baik langsung maupun tidak langsung," terang politikus Partai Golkar itu.



Irma Suryani Chaniago

Dia menegaskan, Komisi IX DPR akan segera membahas informasi tersebut dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Nanti kalau rapat dengan Kemnaker akan kita bahas, sebagai pimpinan Komisi IX saya prihatin atas kasus PHK tersebut," ujarnya.

Terpisah, Direktur & Corporate Secretary PT Gudang Garam Tbk. Heru Budiman membantah ada PHK massal. Dia mengatakan, yang sebenarnya terjadi adalah proses pelepasan 309 karyawan secara normatif.

"Pelepasan lewat mekanisme pensiun normal dan pensiun dini secara sukarela, serta berakhirnya kontrak kerja sesuai batas waktu kontrak kerja," ujarnya, Selasa (9/9/2025).

Heru menjelaskan, kejadian itu tidak berdampak pada perusahaan. Gudang Garam selalu memberikan hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk apabila perseroan merasa perlu melakukan adaptasi skala operasional.

Heru menjelaskan, pihaknya telah meluncurkan beberapa varian produk baru pada 2024. Itu merupakan upaya penyesuaian terhadap kondisi lesunya daya beli konsumen di tengah tingginya cukai rokok dan semakin marak produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.

"Perseroan akan terus berusaha berinovasi dengan produk yang lebih sesuai dengan kondisi pasar yang ada," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah tengah memantau situasi di perusahaan tersebut.

"Kita memonitor, karena Gudang Garam sudah menggunakan juga modernisasi. Nanti kita lihat," ucapnya. ■ PYB